

Pelanggaran UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar

DHESI ALFIRA SARI (1561040015)

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Makassar

Email, Dhesialfirasari7@gmail.com

ABSTRAK, Pelanggaran UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Akbal dan Ririn Nurfaathirany Heri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelanggaran UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar dengan cara mengetahui jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak, faktor penyebab anak melakukan Pelanggaran Lalu Lintas serta upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani masalah Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Pelanggaran UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Rappocini kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) ada beberapa jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak yaitu, tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK, tidak memakai Helm, melawan arus, berkendara melebihi kapasitas penumpang, kendaraan dari segi fisik tidak lengkap. (ii) ada beberapa faktor penyebab anak melakukan pelanggaran Lalu Lintas yaitu faktor keluarga, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemudi sendiri dan faktor pengetahuan dimana anak-anak masih belum mengetahui peraturan yang harus dipatuhi saat berkendara serta faktor lingkungan seperti akibat dari pergaulan anak. (iii) upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu upaya Pre-Emtif (penanggulangan), upaya Preventif (pencegahan) dan upaya Represif (Penanganan).

Kata Kunci: Pelanggaran, Lalu Lintas, Anak

1. PENDAHULUAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Nasional untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara merata sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹ artinya dalam tatanan kehidupan masyarakat ada peraturan yang harus ditaati sebagai wujud dari kontrol sosial yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat dan para penyelenggara

kekuasaan Negara. Oleh karena itu, hukum dalam penerapannya selalu disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya, tak terkecuali anak yang juga melakukan pelanggaran. Kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) merupakan masalah utama yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia saat ini, karena dampak dari kenakalan anak menimbulkan masalah sosial yang tiada ujungnya. Dimana akibat yang ditimbulkan dapat berubah menjadi tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat selain itu dapat membahayakan diri dan mengancam masa depan anak itu sendiri.

¹Buku UU NRI 1945

Kaharuddin dalam bukunya mengemukakan bahwa:

“anak memiliki masa membangun yakni pada masa ini anak mulai menyadari siapa dirinya hal ini memicu ego anak muncul dan anak berkehendak untuk berbuat sesuai dengan keinginannya sendiri untuk lebih mengenal lingkungan disekitarnya.”.²

Anak merupakan tongkat estafet yang menentukan masa depan dari suatu negara, oleh karena itu masalah yang ditimbulkan oleh anak haruslah diatasi, tentu dengan melalui pendidikan yang baik dimulai dari keluarga, Pendidikan sekolah dan lingkungan tempat seorang anak berada karena ketiga lingkungan tersebut sangatlah berperan penting dalam proses pertumbuhan mental dan karakter setiap anak. Anak memiliki potensi diri yang berbeda, ciri khas dari karakteristik yang berbeda pula namun anak-anak tetaplah anak-anak dimana pola pikir dan cara mereka menilai sesuatu hal sangatlah sederhana, contohnya yang menjadi masalah terbesar anak-anak, ialah menerima kata “jangan” karena mempertanyakan alasan dari kata tersebut yang merupakan kata larangan bagi mereka dalam melakukan sesuatu hal. Padahal anak-anak merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar karena melihat dari apa yang dilakukan oleh orang dewasa disekitarnya *children see and children do*.

Sikap penolakan anak untuk tidak mengindahkan larangan orang tua tentu bukanlah sesuatu hal yang menjadikan anak tersebut dianggap sebagai anak nakal karena, hal tersebut merupakan salah satu proses dalam pertumbuhan anak dimana anak ingin mengenal dan mengetahui banyak hal baru. Sementara yang dimaksud anak nakal dalam pasal 1

ayat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ialah “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”³

Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki hak untuk dilindungi sehingga tak heran jika anak mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya yang tergolong telah dewasa, sebagai contoh anak yang melakukan Pelanggaran Lalu Lintas lebih banyak diberi pembinaan dengan cara dinasehati oleh aparat kepolisian sebelum menerima hukuman dari pengadilan sebagaimana apa yang telah ditentukan sesuai Peraturan Lalu Lintas.

Oleh karenanya peneliti sependapat dengan yang dikemukakan Duguit didalam buku yang ditulis oleh Nurul Qamar bahwa “Hukum merupakan aturan tingkah laku para warga masyarakat yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu”.⁴

Apa yang disampaikan oleh Duguit dapat dipahami bahwa hukum dibuat untuk dipatuhi agar tercipta kehidupan yang tertib sehingga membuat hak-hak tiap individu terjamin dalam naungan hukum secara tegas dan mengikat dengan adanya sanksi yang diberikan kepada para pelanggarnya. Kemudian adapun pendapat yang senada Achmad Ali dalam buku yang sama, mengemukakan bahwa “Hukum merupakan serangkaian aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang berisikan petunjuk tentang apa yang

²Kaharuddin. 2018. *Mencetak Generasi Anak Shaleh dalam Hadist*. cetakan ke-1. Yogyakarta: Deepublish. Hal.36

³UU NO 11 Tahun 2012 *tentang sistem peradilan pidana anak*

⁴Nurul Qamar. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*.Cetakan ke-2.Jakarta Timur. Sinar Grafika, hal. 9

boleh dan tidak boleh dilakukan, perintah dan larangan bagi warga masyarakat, yang disertai sanksi pemaksa yang bersifat eksternal”.⁵

Meski telah dijelaskan tentang Indonesia sebagai negara hukum namun, pelanggaran terhadap hukum yang diberlakukan di Indonesia masih banyak terjadi salah satu pelanggaran yang sering terjadi ialah Pelanggaran Lalu Lintas. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi banyak menimbulkan korban, baik korban luka-luka hingga korban yang berujung pada kematian.

Persaingan hidup era modernisasi saat ini menuntut setiap orang untuk bergerak serba cepat dalam segala bidang. Hal tersebut tentu menyebabkan aktivitas di jalan raya menjadi sangat padat. Padatnya aktivitas di jalan raya menimbulkan beberapa masalah seperti macet, pengemudi melanggar rambu-rambu Lalu Lintas hingga mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hobbs dalam terjemahan buku aslinya dimana Hobbs menyimpulkan bahwa “ada banyak faktor pendukung meningkatnya kecelakaan di jalan selain pertambahan dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyaknya orang yang berpergian, dan ini berkisar pada sifat acuh perorangan dan masyarakat terhadap pengekan emosional dan fisik agar dapat hidup aman pada lingkungan yang serba mesin. Walaupun banyak kota kita yang sekarang menjadi sangat ramai dengan kendaraan bermotor, tetapi para insinyur dan perencana telah gagal menciptakan suatu lingkungan yang penggunaannya aman dan beradab. Pengkajian lebih dalam terhadap beberapa faktor menimbulkan kecelakaan di jalan raya, sebelum tindakan yang efektif dapat dilakukan untuk kasus sekarang. Tidak hanya diperlukan suatu pendekatan yang terkoordinasikan, tetapi juga kerja sama

yang efektif diantara polisi, pembuat undang-undang, guru, wartawan, insinyur, perencanaan, dokter dan yang terakhir adalah dengan setiap warga”.⁶

Pelaku dari Pelanggaran Lalu Lintas akhir-akhir ini nampak didominasi oleh anak, hal ini dapat dilihat dari salah satu data laporan perbulan yang didapatkan oleh peneliti di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar tempat peneliti akan melakukan penelitian.

Kenakalan anak saat ini tidak hanya terjadi di sekolah dan tempat tertutup lainnya tapi juga telah marak terjadi di jalan raya. Misalnya balapan di jalan raya, atraksi motor di jalan raya dan lain sebagainya. Hal ini tentu cukup meresahkan masyarakat terutama para pengguna jalan. Tak sedikit yang kita jumpai saat di jalan raya anak-anak dibawah umur turut serta menjadi pengemudi bahkan terkadang kita temukan mereka masih menggunakan atribut sekolah. Padahal telah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwasanya telah diatur secara jelas syarat-syarat menjadi seorang pengemudi. Kendaraan memang merupakan suatu kebutuhan yang mendasar saat ini dikalangan masyarakat pada umumnya untuk memudahkan setiap pekerjaan namun memberikan kesempatan kepada anak dibawah umur untuk ikut menjadi pengemudi sangatlah berbahaya terlebih lagi hal ini bertentangan dengan Undang-undang Lalu Lintas.

Dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Tholabie, Otje Salman mengemukakan bahwa “Eksistensi hukum dalam proses pembangunan sesungguhnya tidak sekadar berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*socialcontrol*), melainkan lebih dari itu, hukum diharapkan mampu menggerakkan masyarakat agar

⁵ Ibid. P. 11

⁶ F. D. Hobbs. 1995. *Perencanaan dan teknik lalu lintas*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 597.

berperilaku sesuai dengan cara-cara baru dalam rangka mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicita-citakan”.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman persaingan dalam dunia pekerjaan pun meningkat drastis hal ini tentu membuat para orang tua sibuk hingga tidak punya banyak waktu untuk mendidik dan mengawasi pertumbuhan dan perubahan sikap anak-anaknya di rumah. Tidak sedikit dari orang tua yang karena kesibukannya diluar rumah membuat mereka memberi kebebasan terhadap anak-anaknya untuk mengatur hidup mereka sendiri tanpa pengawasan. Misalnya, orang tua memberikan kebebasan terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk mengemudi, hal ini tentu menjadi suatu masalah apalagi akhir-akhir ini tingkat pelanggaran telah banyak dilakukan oleh kalangan anak mulai dari pelanggaran-pelanggaran kecil dijalanan hingga mengakibatkan Laka Lantas.

Transportasi tentu merupakan bagian yang tak terpisahkan lagi dari aktivitas masyarakat sehari-hari karena dengan adanya transportasi dapat memudahkan setiap orang untuk terus berpindah tempat dengan mudah.

Namun, seiring dengan zaman yang semakin modern pertumbuhan jumlah transportasi semakin banyak sementara sarana lalu lintas raya yang telah ada dan dirancang sedemikian rupa ternyata tidak cukup memadai sehingga sering menimbulkan Pelanggaran Lalu Lintas.

Pelanggaran Lalu Lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang dibuat dengan pelaksanaan yang diharapkan. Aturan yang dimaksud disini ialah aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat terkhusus dalam hal ini UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran yang telah terjadi maka diperlukan adanya penegakan hukum yang lebih maksimal. Roger Cotterrell mengemukakan bahwa “Penegakan hukum ini dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, pejabat pemerintahan, atau pengadilan. Hukum sebagaimana diketahui, mengandung perintah dan bersifat memaksa sehingga ia membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut”.⁸

Bantuan yang dimaksud ialah Penegak Hukum yang nantinya akan mengupayakan agar hukum dapat menjelma menjadi tindakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti saat melakukan observasi awal dapat diketahui bahwa Pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di daerah Polsek Rappocini pada tahun 2017 sebanyak 847 sedangkan data Pelanggaran Lalu Lintas untuk tahun 2018 dimulai dari bulan Januari hingga bulan September tercatat 450 pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas saat ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga telah banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur baik yang mengemudikan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat di jalan raya meski mereka sendiri telah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan ialah salah. Karena permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“PELANGGARAN DALAM UU N0 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIWILAYAH POLSEK RAPPOCINI KOTA MAKASSAR”**.

⁷Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika, hal. 2.

⁸ Tholabi.op. cit. P. 75.

2. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan pada deskripsi atas fenomena yang diteliti. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh melalui data-data berupa tulisan, pendapat serta dokumen yang terpercaya. Selain itu, data yang diperoleh sangat bermanfaat untuk membantu menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana peneliti mencari dan menggali informasi secara mendalam mengenai alasan-alasan atau hal-hal apa saja yang menjadi faktor anak melanggar Peraturan Lalu Lintas.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian untuk mendapatkan data dari kegiatan penelitian ini berlokasi di kantor Polsek Rappocini Kota Makassar. Peneliti memilih lokasi tersebut untuk dapat mengetahui seberapa banyak kasus Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di lokasi tersebut. Dalam hal ini penulis mencari tahu kasus faktor anak berani melakukan Pelanggaran Lalu Lintas. Penulis memilih tempat tersebut karena berhubungan dengan obyek dalam penyusunan proposal penelitian ini serta tempat tersebut memiliki bahan serta informasi yang peneliti butuhkan.

D. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini ialah anak yang melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polsek Rappocini.

E. Deskripsi Fokus

Pelanggaran Lalu Lintas yang dimaksud ialah tidak memiliki SIM,

tidak membawa STNK, menerobos lampu merah, berkendara dengan muatan penumpang yang melebihi kapasitas, tidak menggunakan atribut keamanan seperti helm dan tidak menggunakan sabuk pengaman didalam mobil, atribut kendaraan tidak lengkap seperti plat kendaraan telah kadaluarsa, tidak memiliki kaca spion, lampu weser tidak berfungsi dan lain sebagainya.

Anak dibawah umur yang dimaksud ialah anak yang belum berusia 17 tahun dan dianggap belum memenuhi syarat sebagaimana tertera di dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa Setiap orang harus memenuhi persyaratan usia yakni harus berusia 17 tahun untuk dapat mengurus Surat Izin mengemudi, administratif, kesehatan, dan lulus ujian untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Syarat usia untuk memiliki SIM sesuai kendaraan yang digunakan yaitu usia 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D, usia 20 tahun untuk SIM B I, dan usia 21 tahun untuk SIM B II.

F. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dalam penelitian ini ialah:

- a. Penentuan atau pemilihan masalah
- b. Latar Belakang
- c. Perumusan Masalah
- d. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- e. Tinjauan Pustaka dan kerangka Konsep

Hasil dari tahap perencanaan ini merupakan rancangan penelitian yang sistematis dalam penulisannya mencakup langkah diatas, dimana penulisan rancangan penelitian haruslah sesuai dengan:

- a. Memuat kegiatan yang akan dilakukan
- b. Sesuai dengan susunan dan sistematis yang logis

- c. Membatasi hal-hal yang tidak diperlukan
- d. Memperkirakan hasil yang akan dicapai

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam penelitian ialah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data
- c. Penafsiran hasil analisis

Melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian diproses melalui penyuntingan dan analisis data sebagai dasar penarikan kesimpulan.

G. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data lapangan atau dari lokasi penelitian, dalam hal ini adalah 10 orang anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas dan 4 orang petugas kepolisian di kantor Polsek Rappocini Kota Makassar.

b. Data Sekunder

Data diperoleh dari literatur seperti perpustakaan, informasi dari masyarakat, buku-buku tulisan makalah serta pendapat dari para pakar hukum yang digunakan sebagai data pelengkap untuk melengkapi data penelitian.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Instrumen utama dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri, dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yakni sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak jika dianggap perlu memperoleh keterangan yang diperlukan dari responden. Karenanya, diperlukan beberapa instrumen pendukung seperti, *tape recorder*, kamera, dan buku catatan serta alat tulis.

I. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan, yakni pengamatan tentang pelanggaran berlalu lintas oleh anak. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran langsung dari masalah yang diteliti dengan cara mengamati secara langsung di jalan wilayah Polsek Rappocini kota Makassar bagaimana pelanggaran berlalu lintas dapat dilakukan oleh anak dan melihat secara langsung bagaimana pihak kepolisian menindak lanjuti pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara berdiskusi secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti melakukan wawancara dengan 10 orang anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan 4 orang petugas kepolisian dari Polsek Rappocini Makassar. Untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan jelas mengenai pelanggaran berlalu lintas anak dibawah umur di wilayah Polsek Rappocini Makassar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan bukti berupa gambar atau video visual yang diambil saat peneliti melakukan wawancara dengan informan yang ditemui di wilayah Polsek Rappocini kota Makassar. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti: Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sejumlah buku, tulisan, karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti.

J. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data maka peneliti menggunakan beberapa

teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:

1. Ketekunan pengamatan, yaitu peneliti melakukan pengamatan dengan cermat dan berkesinambungan mengenai fenomena yang diteliti dengan maksud untuk meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh sehingga peneliti dapat menggambarkan secara akurat dan terstruktur mengenai apa yang diteliti.
2. Dalam memenuhi keabsahan data dari penelitian ini maka dilakukan triangulasi dengan sumber maksudnya ialah pada penelitian ini dilakukan perbandingan hasil wawancara dengan isi dokumen yang diperoleh atau pengamatan penyesuaian data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh oleh peneliti.

K. Analisis

Analisis data yang diperoleh selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. .

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam aktifitas Lalu Lintas tentu ada aturan yang harus dipatuhi oleh semua pengguna jalan baik pengemudi ataupun pejalan kaki. Selain adanya Rambu-Rambu Lalu Lintas sebagai petunjuk disetiap jalan yang harus dipatuhi tentu peran polisi juga amat diperlukan dalam hal ini, selaku penegak hukum dimasyarakat. Polisi sebagai Penegak Hukum akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melakukan perbuatan tindak pidana termasuk pelanggaran berlalu lintas.

Berikut jenis-jenis pelanggaran lalu lintas:

1. Melanggar Rambu Lalu Lintas seperti melanggar tanda dilarang parkir, dilarang berputar, dilarang masuk dan lain-lain
2. Tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi
3. Tidak membawa Surat Izin Mengemudi
4. Tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
5. SIM telah kadaluarsa
6. STNK telah kadaluarsa
7. Melanggar atau menerobos lampu lalu lintas
8. Menggunakan alat komunikasi saat berkendara
9. Melawan arus lalu lintas
10. Masuk ke jalur bis/busway
11. Ngebut di jalan melebihi batas kecepatan maksimal
12. Menghambat pergerakan kendaraan yang ada disekitarnya
13. Tidak menggunakan plat nomor kendaraan yang berlaku
14. Mengemudi sambil mabuk/ setengah sadar
15. Balapan atau kebut-kebutan di jalan raya
16. Tidak menyalakan lampu kendaraan di malam hari
17. Berjalan di trotoar jalan yang bukan untuk kendaraan bermotor
18. Melanggar pintu perlintasan kereta api yang tertutup
19. Berbelok tanpa menggunakan lampu sign/lampu sen.⁹

Diatas merupakan jenis-jenis pelanggaran lalu lintas secara umum, berikut

penulis sajikan jenis-jenis pelanggaran lalu lintas khusus mobil ialah:

1. Tidak memakai sabuk pengaman
2. Membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan

⁹ Wawancara dengan IPTU Budiono, tanggal 7 januari 2019 di pos LANTAS Polsek Rappocini Area ST Alauddin

3. Menggunakan jalan darurat tanpa kondisi darurat di jalan tol
4. Memasuki jalur 3 in 1 dengan jumlah penumpang kurang dari 3 orang

Adapun jenis-jenis pelanggaran lalu lintas khusus sepeda motor ialah:

1. Tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Tidak menyalakan lampu di pagi hari, siang hari dan sore hari
3. Membawa lebih dari 2 orang dalam satu motor
4. Masuk ke jalan tol dan jalan khusus roda empat.

Demikian hal-hal diatas yang dapat dikenai Tilang. Mematuhi Peraturan Lalu Lintas merupakan bentuk perilaku warga Negara yang baik (untuk melihat jenis pelanggaran lalu lintas dan dendanya terdapat pada lampiran halaman 79).

B. Faktor Penyebab Anak

Melanggar Peraturan Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan melanggar yang paling sering terjadi khususnya di Indonesia. Pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh pengendara dewasa tetapi juga telah banyak dilakukan oleh anak ada beberapa penyebab anak mengenai SIM saya memang belum punya karena saya masih dibawah umur 17 tahun belum memenuhi syarat untuk dapat mengurus Surat Izin Mengemudi”.¹⁰

Sama halnya dengan Andi Reza seorang siswa SMP yang masih berumur 13 tahun yang mengemudi tanpa membawa STNK serta membawa SIM milik orang tua bukan miliknya sendiri. Menurut Andi Reza saat wawancara ia mengatakan bahwa:

“Saya tidak membawa STNK tapi kalau SIM bawa, setahu saya SIM itu Surat Izin Mengemudi tapi saya tidak tahu kalau itu harus punya saya, saya pikir sama saja mau itu punya Bapak atau saya yang pentingkan saya bawa”.¹¹

Dari apa yang disampaikan oleh Andi Reza dapat kita ketahui bahwa sebagian besar anak-anak yang mengemudi sendiri sebenarnya belum tahu bahkan belum paham tentang syarat dan peraturan berlalu lintas. Karena hal tersebut kita tidak dapat menyalahkan anak-anak karena ketidaktahuan mereka tentang peraturan lalu lintas namun hal tersebut merupakan tanggungjawab orang tua dalam mendidik dan mengajarkan anak-anaknya tentang baik buruknya kehidupan. Besarnya resiko kecelakaan di jalan tak membuat sebagian orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya pasalnya kesibukan orang tua seakan memaksa mereka untuk mengizinkan anak-anak mereka mengemudi kendaraan bermotor sendirian di jalan.

Ada beberapa Faktor Penyebab Anak Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas yaitu:

(a) Faktor Keluarga

Keluarga adalah tempat pertama dimana anak mendapatkan pendidikan pertamanya sebelum memasuki dunia sosial yang lebih luas, tempat dimana anak dibesarkan dimana didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang paling utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Karena jika orang tua tidak mengizinkan dan memberikan kebebasan kepada anaknya yang masih dibawah umur untuk

¹⁰Wawancara dengan Resky dan Gunawan, tanggal 27 November 2018 di Pos SATLANTAS Polsek Rappocini Area ST. Alauddin (samping Mc Donald).

¹¹Wawancara dengan Andi Reza, tanggal 27 Desember diPos SATLANTAS Polsek Rappocini Area ST. Alauddin (Emmy Saelan)

mengendarai kendaraan bermotor maka tidak akan terjadi pelanggaran Lalu Lintas yang pelakunya adalah seorang anak.

Menurut Ahmarullah (AIPTU) sendiri saat diwawancarai mengatakan:

“Pihak anak ataupun orang tua menganggap Tilang yang kami lakukan itu tidak seharusnya padahal sudah jelas bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh anak seperti berbelok tanpa weser, kondisi fisik kendaraan tidak sesuai aturan dan yang paling penting ialah si anak ini belum memenuhi syarat untuk menjadi seorang pengemudi.”¹²

Selain itu Ahmarullah (KANIT) juga mengeluhkan sikap para orang tua yang mengabaikan himbauan kepolisian untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anaknya agar pelanggaran lalu lintas tidak terjadi lagi serta menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ahmarullah mengatakan bahwa:

“Setelah diberi pembinaan di kantor didampingi wali/orang tua tetap saja apa yang kami sampaikan itu tidak diindahkan sehingga membuat pelanggaran tetap terulang entah si anak yang memang tidak patuh pada aturan atau orang tuanya yang terus memberi izin kepada si anak untuk tetap mengemudi karena alasan kesibukan kerja. Hal ini menjadi kesulitan utama bagi kami pihak kepolisian”.¹³

Kesulitan dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak karena tidak adanya kesadaran dan bantuan dari pihak keluarga dalam mengawasi serta memberikan peringatan tegas kepada anaknya bahkan orang tua terkadang membantu anaknya untuk

menutupi kesalahannya menjadi kesulitan utama bagi Pak Ahmarullah beserta rekan-rekan kepolisian didalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas agar tidak terulang kembali.

Dari pembahasan diatas peneliti berpendapat bahwa anak sekolah berpotensi melakukan Pelanggaran Lalu Lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia saat ini namun tidak memberi pengawasan yang tepat terhadap anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor. Bahkan sebagian besar orang tua dengan sengaja memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya untuk digunakan dengan alasan bahwa kesibukannya diluar rumah membuat mereka tidak punya waktu mengantar jemput anak-anak mereka kesekolah karena jika orang tua tidak mendukung dan memfasilitasi, maka anak tidak mungkin mengemudi kendaraan bermotor sendirian dan melakukan Pelanggaran Lalu Lintas dengan kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas.

(b) Faktor Pendidikan

Sekolah adalah media perantara bagi pembinaan jiwa anak, sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak baik dari segi pengetahuan, pembentukan moral dan tingkah laku anak.

Menurut Bakri (IPDA) saat ditemui beliau mengatakan bahwa:

“Untuk menekan pelanggaran lalu lintas kami melakukan sosialisasi berupa himbauan ke beberapa sekolah sekitar kecamatan Rappocini untuk mematuhi peraturan lalu lintas serta melakukan kerja sama dengan pihak sekolah agar kiranya pihak sekolah menerapkan aturan tegas bahwa yang boleh membawa kendaraannya kesekolah hanya

¹²Wawancara dengan AIPTU Ahmarullah, tanggal 03 Januari 2018 di Kantor SATLANTAS Polsek Rappocini Kota Makassar.

¹³ibid

anak-anak yang sudah memenuhi syarat menjadi pengemudi.”¹⁴

Dari yang disampaikan pak Bakri dapat diketahui bahwa ketidaktahuan anak tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas harus diatasi sejak dini seperti melalui himbauan kesekolah sekolah. Perilaku dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan kurang pedulinya orang tua terhadap keselamatan anak di jalan serta pihak sekolah yang juga tidak dapat memberikan himbauan tegas terhadap peserta didiknya tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. Sekolah harusnya memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah bagi yang belum berumur 17 tahun serta belum memenuhi syarat-syarat menjadi seorang pengemudi. Jadi dapat diketahui bahwa peran sekolah juga tidak kalah penting dalam hal memberikan izin untuk anak dalam mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.

(c) Faktor Pergaulan atau Lingkungan Anak

Pengaruh lingkungan memiliki dampak besar dalam pertumbuhan mental anak, dimana anak bergaul dengan siapapun, yang menjadi teman bermain anak juga sangat mempengaruhi sikap sang anak pasalnya anak cenderung sangat mudah terpengaruh oleh situasi disekitarnya, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi *deliquen* karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produk hukum. Para anak menjadi nakal sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang

menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul maka semakin besar juga kemungkinan anak berteman dengan anak nakal dan semakin lama pergaulan tersebut berlangsung maka semakin besar pula kemungkinan anak akan ikut menjadi nakal.

Beberapa anak saat diwawancari mengaku sering bepergian bersama teman-temannya menggunakan kendaraan bermotor tanpa tahu aturan lalu lintas yang harus dipatuhi selain tidak menerobos lampu merah dan kewajiban memakai helm, Gilang siswa SMP berusia 14 tahun mengaku bahwa:

“Saya kadang-kadang kalau tidak diajak teman pergi maka saya yang mengajak jalan-jalan seperti ke Benteng Somba Opu atau ke Balla Lompoa nongkrong sama teman-teman. Kami tidak pernah balapan hanya saja kalau teman saya mengemudi dengan motor cukup kencang maka saya juga ikut menambah kecepatan motor saya agar tidak tertinggal”¹⁵

Lain halnya dengan Asra seorang anak berusia 15 tahun yang ketika Saat diwawancari Asra terlihat bingung sendiri saat ditanya ia mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu kalau kendaraan dengan satu kaca spion juga termasuk melanggar lalu lintas, kalau SIM saya pakai kartu tanda pelajar untuk ditunjukkan ke polisi tapi tadi memang saya tidak membawa STNK kendaraan. Sekarang saya disuruh pulang untuk memberitahu orang tua saya untuk segera datang ke kantor polisi mengurus pengambilan kendaraan saya tapi masalahnya orang tua saya masih kerja. Saya mau pulang dengan angkutan

¹⁴Wawancara dengan AIPDA Bakri, tanggal 31 Desember di Kantor SATLANTAS Polsek Rappocini Kota Makassar.

¹⁵Wawancara dengan Gilang, tanggal 08 Desember 2018 di Kantor SATLANTAS Polsek Rappocini Kota Makassar.

umum tapi saya tidak punya ongkos untuk pulang”.¹⁶

Sementara menurut pak Sukri (AIPDA) saat diwawancarai beliau mengatakan bahwa:

“Bagi anak yang belum memenuhi syarat menjadi pengemudi baik itu roda dua ataupun roda 4 seharusnya tidak mengemudi apapun alasannya, itu tidak dibenarkan tapi kami masih bisa maklum karena selain memang belum memenuhi syarat untuk mengurus SIM juga karena kesibukan orang tua mereka membuat mereka harus mengemudi sendiri tapi kalau sudah umur 17 tahun keatas tapi belum punya SIM saat berkendara maka kami akan tetap memberikan tilang”¹⁷

Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut sangatlah diperlukan. Orang tua perlu lebih memperhatikan sang anak dari sebelumnya, mendidik anak dengan tegas namun penuh kasih sayang agar mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan/ pergaulan yang kurang baik.

A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak

Upaya penanggulangan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah Kecamatan Rappocini telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi terkait dalam hal ini

aparat Polsek Rappocini bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti masyarakat dan sekolah-sekolah di kecamatan Rappocini. Hal tersebut sebagaimana penjelasan yang didapatkan peneliti saat melakukan wawancara dengan Pak Sukri (AIPDA) bersama Pak Budiono (KANIT) Upaya yang dilakukan pihak Polsek Rappocini bagian Lalu Lintas berupa sosialisasi ke beberapa sekolah dengan memberikan himbauan agar anak tidak mengemudi sebelum memenuhi persyaratan menjadi seorang pengemudi. Sekolah-sekolah yang telah diberi himbauan oleh pihak Polsek Rappocini ialah SMA IX MAKASSAR, SMK VI MAKASSAR, SMK TELKOM MAKASSAR, MAN II MAKASSAR, dan SMP 21 MINASAUPA.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah upaya *Pre-Emtif*, upaya *prevenntif* (pencegahan) dan upaya *represif* (penindakan).

1. Upaya *Pre-Emtif*

Upaya *Pre-Emtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran secara *Pre-Emtif* adalah menanamka sikap kebaikan kedalam hati seseorang. Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, serta terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup taat pada peraturan. Upaya-upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Rappocini, yakni berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah dari tingkat Menengah Pertama hingga tingkat lanjutan di wilayah Polsek Rappocini mengenai pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas, serta

¹⁶Wawancara dengan Asra, tanggal 29 November 2018 di Pos SATLANTAS Polsek Rappocini area ST Alauddin Kota Makassar.

¹⁷Wawancara dengan AIPDA Sukri, tanggal 29 November 2018 di Pos SATLANTAS Polsek Rappocini area ST Alauddin Kota Makassar.

melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak.

2. Upaya *Preventif* (Pencegahan)

Upaya-upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah pelanggaran adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik para pelaku pelanggaran menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, Polsek Rappocini setelah melakukan sosialisasi mereka melihat dan mengawasi siswa-siswa dari berbagai sekolah mengenai seberapa banyak mereka melakukan pelanggaran setelah mengetahui dari sekolah mana yang sering melakukan pelanggaran maka pihak kepolisian akan kembali memberikan himbauan ke pihak sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AIPTU Ahmarullah (PANIT II LANTAS Polsek Rappocini), upaya-upaya *preventif* yang telah dilakukan ialah menertibkan arus lalu lintas sekaligus mengamati, melakukan razia di wilayah Polsek Rappocini, melaksanakan patroli.

3. Upaya *Represif* (Penindakan)

Penanggulangan yang bersifat *represif* ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk pelanggaran. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur menurut AIPDA Sukri diPolsek Rappocini kota Makassar adalah sebagai efek jera bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas oleh anak

dibawah umur. Penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran oleh pengendara kendaraan bermotor dibawah umur berupa tindakan minimal (teguran) dan berupa penindakan maksimal (tilang).

Penindakan yang diterapkan oleh pihak Kepolisian Polsek Rappocini kota Makassar dapat dibagi dua sebagai berikut:

1) Penindakan minimal (teguran):

Pelanggaran seperti tidak mempunyai SIM dan tidak memakai helm

2) Penindakan maksimal (tilang):

Melanggar rambu lalu lintas, tidak mempunyai STNK, sepeda motor menyalahi spesifikasi standarisasi dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Perintah dari komandan bahwa semua pelanggar lalu lintas pada lokasi dan tempat tertentu harus ditindak tegas, petugas menyadari pelanggaran oleh anak dijatuhi hukuman (tilang) yang maksimal dengan tujuan memdidik dan menimbulkan efek jera. Upaya Represif Yang Diterapkan Oleh Kepolisian Terhadap Anak Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas. Tabel 02.

Sumber: Administrasi SATLANTAS Polsek Rappocini

Thn	Jumlah GAR	Usia	Jenis Pelanggaran	Penerapan Sanksi Dari Kepolisian
2016	39	0 – 16 tahun	— Melawan arus — Tidak memakai helm — Melanggar rambu-rambu lalu lintas	— Penyitaan kendaraan — Orang tua anak dipanggil — Memberikan arahan dan pembinaan terhadap anak bersama orang tuanya
	20	17 tahun	— Berboncengan tiga	
2017	60	0 - 16 tahun	— Tidak membawa STNK	— Tilang dilakukan ketika anak melakukan pelanggaran yang kedua kalinya serta jika pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran dari segi persuratan yang tidak lengkap dan karena Spesifikasi motor yang tidak standar seperti: knalpot.
	31	17 tahun	— Tidak memiliki SIM — Plat Motor sudah tidak berlaku	
2018	28	0 – 16 tahun	— Kondisi fisik Kendaraan tidak lengkap	
	18	17 tahun	— Berhenti ditengah jalan — Berbelok tidak sesuai lampu weser	
Total pelanggaran lalu lintas oleh anak				196 pelanggaran

Penjelasan dari tabel diatas ialah pada tiga tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlah pelanggaran anak mencapai 196 pelanggar dimana anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun berjumlah 127 pelanggar dan anak berusia 17 tahun 69 pelanggar. Data yang diberikan pihak Polsek Rappocini tidak secara spesifik menentukan jumlah pelanggaran didaerah kecamatan Rappocini sendiri karena ada banyak anak yang melanggar namun lolos dari pihak kepolisian, peneliti sendiri melakukan beberapa kali penjagaan di beberapa sudut jalan kecil dan benar saja anak-anak ketika telah melihat polisi dari kejauhan akan berbelok masuk ke jalan-jalan kecil pemukiman warga untuk menghindari pihak kepolisian.

Pak Budiono (KANIT) saat ditemui untuk wawancara menjelaskan bahwa:

“Dengan memberikan himbauan pentingnya menaati peraturan lalu lintas di sekolah-sekolah sedikit demi sedikit bahkan kami harap tidak ada lagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena anak sendiri merupakan bagian penting dari negara kita jadi kalau mau negaranya baik tentunya generasi penerusnya dulu yang harus dibuat baik”.¹⁸

Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak pada tabel 02. ada sanksi dari pihak kepolisian yakni dimana kendaraan yang digunakan oleh anak akan disita dan pihak kepolisian akan meminta anak untuk menghubungi orang tuanya baik itu melalui telepon genggam ataupun secara langsung pulang untuk menemui orang tuanya. Hal tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian untuk dapat secara langsung menyampaikan pelanggaran apa yang dilakukan oleh anaknya serta secara langsung memberikan arahan kepada

orang tua sekaligus anak akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas serta bahaya yang dapat timbul akibat tidak mematuhi peraturan lalu lintas.

Penindakan minimal yang berupa teguran merupakan penindakan dari pihak kepolisian yang masih dalam batas toleransi. Ada beberapa alasan mengapa petugas kepolisian tidak memberikan penindakan maksimal terhadap pelaku pelanggaran oleh anak dibawah umur seperti kesalahan pelanggar masih dapat dimaafkan, seperti tidak membawa helm, tidak mempunyai atau petugas kasihan terhadap pelanggar. Karenanya hal tersebut menyebabkan timbulnya anggapan dari masyarakat bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak memiliki tindakan yang tidak tegas dari pihak kepolisian sehingga banyak orang tua yang menganggap sepele pelanggaran lalu lintas dan memberi kebebasan dan kepercayaan lebih terhadap anak-anaknya untuk berkendara sendiri dengan alasan kesibukan kerja yang tidak dapat ditinggalkan. Akibatnya, setiap pelanggaran yang dilakukan dirasakan seperti tidak merasakan pengaruh yang berarti (signifikan) dari tindakan yang diberikan oleh pihak kepolisian sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anak di daerah Polsek Rappocini seperti tidak memiliki STNK, perlengkapan motor yang tidak memenuhi standar seperti knalpot yang sengaja diblonng maka akan diberi sanksi yang tegas yaitu tilang hal tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian karena selain polusi suara yang mengganggu serta dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas karena suaranya yang dapat membuat pengemudi lain terkejut. Beberapa kasus dilapangan pihak kepolisian

¹⁸Wawancara dengan IPTU Budiono, tanggal 7 Januari 2019 di Pos LANTAS Polsek Rappocini Area ST Alauddin.

berani mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak. Tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu: pelanggar secara terang-terangan menantang dan menyepelekan imbauan petugas, melanggar rambu lalu lintas, sepeda motor menyalahi spesifikasi standarisasi, adanya perintah dari komandan bahwa semua pelanggar lalu lintas pada lokasi dan tempat tertentu harus ditindak tegas (diberi hukuman maksimal berupa tilang), petugas sangat menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak dapat dijatuhi hukuman (tilang) yang maksimal dengan tujuan mendidik dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera. Penerapan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah ditemukan diatas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anak ada beberapa yaitu, tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK, tidak memakai helm, melawan arus, berboncengan tiga, kelengkapan fisik kendaraan tidak lengkap.
2. Faktor penyebab anak melakukan pelanggaran lalu lintas ialah karena adanya dukungan dari orang tua dengan cara memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya untuk mengemudi sendiri, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak karena kesibukan pekerjaan membuat para orang tua mengabaikan bahaya dan resiko yang harus dihadapi oleh anak-anak mereka di jalan. Pihak sekolah yang tidak memberi dukungan kepada pihak kepolisian dalam memberikan himbauan terhadap para siswa agar tidak menggunakan kendaraan

pribadi kesekolah sebelum memenuhi syarat sebagai seorang pengemudi serta lingkungan pergaulan anak yang salah dapat membuat anak menjadi nakal karena adanya ajakan dari teman-teman sebaya untuk melakukan hal-hal negatif yang dapat menjerumuskan anak ke pengadilan. Ajakan teman yang salah akan membuat anak menjadi berani bahkan dengan sengaja serta secara sadar melakukan pelanggaran di jalan raya seperti melanggar peraturan berlalu lintas.

3. sanksi berupa tilang kepada anak akan tetap dilakukan melalui proses peradilan pada pengadilan negeri, karena yang dijadikan pedoman oleh pihak kepolisian ialah undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tanpa berpedoman pada undang-undannng nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 menyebutkan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilaiupah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Menurut peneliti sebagaimana yang ditemukan dilapangan selama penelitian berlangsung didaerah Polsek Rappocini pelaku pelanggaran lalu lintats dibawah

umur dapat dilakukan diversi jika kepolisian berpedoman juga dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012, dimana pihak kepolisian tidak perlu memproses anak di muka pengadilan. Karena, hal tersebut hanya berupa pelanggaran atau tindak pidana ringan dan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 disebutkan dalam kesepakatan diversi yang berupa pelanggaran atau tindak pidana ringan salah satunya dilakukan dengan cara penyerahan kepada orang tua / wali. Di Polsek Rappocini sendiri dalam memberikan tindakan kepada anak yang melanggar peraturan lalu lintas tindakan diversi adalah hal yang pertama diterapkan sebelum membawa anak ke muka pengadilan hal ini karena pihak kepolisian melihat dan menilai seperti apa pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di wilayah Polsek Rappocini yakni melalui upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga lanjutan dikecamatan Rappocini tentang pencegahan dan pemahaman tertib berlalu lintas, upaya preventif yang sudah dilakukan pihak Polsek Rappocini menertibkan arus lalu lintas sekaligus mengamati, melakukan razia di wilayah Polsek Rappocini, melaksanakan patroli. upaya represif (penindakan) yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh anak dengan cara memberikan Tilang terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu

lintas yang mana pelanggaran tersebut sudah tidak dapat ditolerir lagi.

B. Implikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam rangka mencegah pelanggaran UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut berakibat pada keselamatan antar pengguna jalan di wilayah Polsek Rappocini kota Makassar.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah beserta aparat kepolisian hendaknya melakukan sosialisasi dan himbauan kepada orang tua dan anak mengenai pentingnya menaati peraturan lalu lintas serta memperluas kunjungan sosialisasi kesetiap sekolah mengenai bahaya yang mengancam saat berkendara di jalan raya selain untuk menanamkan perilaku taat lalu lintas hal ini juga diharapkan dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.
2. Melakukan sosialisasi kepada orang tua akan pentingnya menjaga dan mengawasi anak-anak mereka disetiap tumbuh kembangnya, memberikan pemahaman akan bahaya yang mungkin saja mengancam keselamatan anak saat sedang berada di jalan serta besarnya dampak negatif yang dapat merusak pola pikir anak ketika tidak dalam pengawasan orang tua.
3. Pihak kepolisian dalam menjalankan tugas hendaknya Pihak kepolisian hendaknya dapat memperluas jangkauannya didalam memberikan himbauan kepada masyarakat dan memperketat pemeriksaan pada semua pelaku pelanggaran lalu lintas terutama anak serta pemberian peringatan tegas bagi orang tua dan

anak agar tidak melakukan kesalahan yang sama kembali.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dzulkifli Umar & Jimmy P. 2012. *Kamus Hukum*. Surabaya: Grahamedia Press.
- F.D. Hobbs. 1995. *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UGM Press.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal edisi ke-7*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Hadiman. 2010. *Mengenal Lalu Lintas Sejak Dini Dilengkapi Dengan UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Penerbit BERSAMA.
- Kaharuddin. 2018. *Mencetak Generasi Anak Shaleh dalam Hadist*. cetakan ke-1. Yogyakarta: Deepublish. Hal. 36
- Nurul Qamar. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Permata Press. 2011. *Buku UUD 1945 Amandemen I, II, III dan IV*. Permata Press.
- Tim Permata Press. 2017. *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jabodetabek: Permata Press.
- Tim Visi Yustisia. 2014. *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHPA & KUHP Perdata*. Jakarta Selatan: Visimedia.

Tim Penyusun Fakultas Ilmu Sosial UNM. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: CV. BERKAH UTAMI.

UNDANG-UNDANG:

UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

UU NOMOR 11 TAHUN 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

UU NOMOR 22 TAHUN 2009 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

JURNAL:

Amriani. 2017. *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Polres Jeneponto*.

Abiantoro Gautama Adhi. *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta*. Volume 15, Hal. 7

INTERNET:

Organisasi. (1970). Macam jenis pelanggaran lalu lintas. Di peroleh pada tanggal

05 oktober 2018. Dari www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-pelanggaran-lalu-lintas-yang-akan-ditilang-polisi-mobil-sepeda-motor.htm

Wikipedia (2017). Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota

Makassar. Diperoleh pada tanggal 28 November 2018. Dari Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kecamatan_dan_kelurahan_di_kota_makassar.